



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUH. GUNTUR HAMZAH**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **156383**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 11.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/148 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/172 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 359.100.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO LX 150 SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOTOR, SUZUKI EN 125 A Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 950.000
4. LAINNYA, SEPEDA MEREK HUMO C20 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000
5. LAINNYA, SEPEDA MEREK BROMPTON B19 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.100.000
6. LAINNYA, SEPEDA LIPAT --- Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 858.350.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.567.506.325
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	28.834.956.325
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	28.834.956.325

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.